



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REGISTER PERMINTAAN INFORMASI
PERIODE TRIWULAN III (JANUARI-SEPTEMBER) TAHUN 2022

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara	
									Dibawah Pengawasan		Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak										
JANUARI 2022																				
1	PST-03012022-051	2022-01-03				Umum	1. Semua informasi data, dokumen, evaluasi, studi ilmiah, kajian, kesimpulan dan informasi apa pun yang berkaitan dengan keamanan, mutu, kemanjuran dan analisis risiko-manafaat, dan 2. Semua informasi data farmakovigilans, dari semua kelompok umur sejak awal vaksinasi, yang diterima Badan POM dari produsen vaksin atau dikumpulkan dari sumber lain untuk vaksin yang digunakan untuk anak-anak dibawah 12 tahun (Sinovac).	1) Keterbukaan/transparansi data publik untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat; 2) Membuat keputusan rasional vaksinasi anak-anak di lingkungan keluarga dan masyarakat; 3) Memastikan pemerintah bertanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dialami masyarakat pasca vaksinasi; 4) Meyakinkan masyarakat untuk program vaksinasi anak dan memberitahukan segala risikonya.	v				v		Dikabulkan Sebagian	Dokumen detail terkait uji klinik serta laporan efek samping vaksin setelah digunakan masyarakat (data farmakovigilans) tidak dapat dibuka untuk publik berdasarkan Keputusan FPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.	2022-01-03	2022-01-04	0	-
2	PST-04012022-062	2022-01-04				Karyawan	Perseujuan penggunaan darurat EUA Vaksin COVID-19 jenis Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Astrazeneca, dan Moderna.	Referensi pengambilan keputusan memilih jenis Vaksin COVID-19	v				v		Dikabulkan Sepenuhnya		2022-01-13	2022-01-14	0	-
3	PST-31012022-013	2022-01-31				Pelajar/Mahasiswa	Analisis risiko-manafaat lengkap dari izin Penggunaan Darurat (EUA) Remdesivir dengan semua data, studi, dan dokumen terkait.	1. Keterbukaan/transparansi data publik untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 2. Membuat keputusan rasional untuk menggunakan obat tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat 3. Memastikan pemerintah bertanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dialami masyarakat akibat penggunaan obat tersebut	v				v		Dikabulkan Sepenuhnya		2022-02-03	2022-02-03	0	-
FEBRUARI 2022																				
1	PST-03022022-077	2022-02-03				Umum	Informasi mengenai sertifikat izin edar atau surat keterangan terdaftar di Badan POM atas produk : Gumalixa, Lamcare, Insulva, Yacona dan Aloose	Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang sudah mendapatkan izin edar tpom	v				v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-02-07	2022-02-07	0	-
2	PST-04022022-037	2022-02-04				Pelajar/Mahasiswa	Analisis risiko-manafaat lengkap dan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Remdesivir dengan semua data, studi, dan dokumen terkait.	Untuk bisa membantu/menginformasikan ke rekan-rekan saya yang masih dalam pengobatan dan minum obat Remdesivir tersebut.	v				v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-02-04	2022-02-07	0	-
3	PST-15022022-036	2022-02-14				Umum	Analisis risiko versus manfaat untuk semua vaksin booster, dan semua data keamanan, efektivitas serta dokumen terkait	1. Keterbukaan/transparansi data publik untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat 2. Memastikan pemerintah bertanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dialami masyarakat pasca vaksinasi 3. Memberitahukan masyarakat segala resiko melakukan booster	v				v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-02-21	2022-02-21	0	-
MARET 2022																				
1	PST-24022022-009	2022-03-04				Ibu Rumah Tangga	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	UUJ keterbukaan informasi publik	v				v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
2	PST-24022022-016	2022-03-04				Pelajar/Mahasiswa	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	1. Keterbukaan/transparansi data publik untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat 2. Membuat keputusan rasional vaksinasi di lingkungan keluarga dan masyarakat 3. Memastikan pihak vaksinator bertanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dialami masyarakat pasca vaksinasi 4. Meyakinkan masyarakat untuk program vaksinasi dan memberitahukan segala risikonya	v				v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara	
									Dibawah Pengawasan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
3	PST-24022022-023	2022-03-04				Karyawan	Halalasan yang mendasari Badan POM memberikan izin penggunaan darurat/Emergency Use Authorization (EUA) pada semua vaksin COVID-19 yang sudah beredar di Indonesia, yaitu semua informasi data, dokumen, studi uji klinis, evaluasi, studi ilmiah, kajian, kesimpulan dan informasi apa pun yang berkaitan dengan keamanan, mutu/keamanan dan analisis risiko-manfaat dari semua vaksin Covid-19 yang disetujui di Indonesia, pada semua kelompok umur, termasuk untuk booster homolog, booster heterolog dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	1. Permintaan informasi ini dibuat berdasarkan UU KIP (14/2008) dalam kebutuhan terhadap keterbukaan/transparansi data, untuk selanjutnya dipelajari dan dipahami. 2. Membuat keputusan rasional pribadi atau keluarga untuk vaksinasi dan/atau boosternya 3. Mengetahui segala macam resiko pasca vaksinasi/booster dan bentuk kepastian tanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dalam pasca vaksinasi/booster.	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-18	0	-
4	PST-24022022-028	2022-03-04				Pelajar/Mahasiswa	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid-19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap	1. Permintaan informasi ini dibuat berdasarkan UU KIP (14/2008) dalam kebutuhan terhadap keterbukaan/transparansi data, untuk diketahui dan dipahami 2. Membuat keputusan rasional vaksinasi untuk pribadi atau keluarga 3. Mengetahui segala macam resiko pasca vaksinasi dan bentuk kepastian tanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dalam pasca vaksinasi	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
5	PST-24022022-036	2022-03-04				Umum	Data lengkap dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui dan dilaksanakan di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lainnya	Mengetahui informasi keamanan pelaksanaan program vaksinasi, sesuai UU keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
6	PST-24022022-051	2022-03-04				Umum	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui DI INDONESIA, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	UU keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
7	PST-24022022-055	2022-03-04				Umum	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	Undang-Undang keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
8	PST-24022022-059	2022-03-04				Pelaku Usaha	Mohon informasi Data Uji Klinis Vaksin Sinovac, Astra zeneca, Pfizer, Moderna	Untuk Kepentingan Pribadi	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
9	PST-24022022-060	2022-03-04				Karyawan	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	Untuk keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
10	PST-24022022-075	2022-03-04				Pelaku Usaha	semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap	UU keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
11	PST-24022022-078	2022-03-04				Karyawan	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap	UU keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
12	PST-24022022-082	2022-03-04				Karyawan	Mohon informasikan ke publik.... Apa kandungan dari Vaksin? Apa efek orang yang sudah vaksin? Apakah Vaksin itu bersifat paksa apa sukarela? Apakah Vaksin itu aman? Kalo aman siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi KIPI?	Agar jelas dan semua publik tau apa kandungan dan keamanan dari Vaksin	v			v		v		Dikabulkan Sebagian		2022-03-16	2022-03-18	0	-
13	PST-24022022-085	2022-03-04				Ibu Rumah Tangga	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang disetujui di Indonesia, termasuk untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya "fact sheet" tapi semua data lengkap.	UU keterbukaan informasi publik	v			v		v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara		
									Dibawah Penggunaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Perbitaraan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
14	PST-24022022-086	2022-03-04				Karyawan	1. Keamanan dan efektivitas vaksin kopi 19 yang telah mendapatkan emergency use authorization di Indonesia 2. Pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 khususnya varian delta dan omicron. 3. Fraksinasi kepada penyintas covid 19, dan 4. Efek samping vaksinasi covid 19 5. Dokumen tebal terkait uji klinik serta laporan efek samping vaksin setelah digunakan masyarakat untuk semua usia (data farmakovigilans)	Membuat keputusan rasional vaksinasi anak-anak dan keluarga.	v	Informasi terkait pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 khususnya varian delta dan omicron serta vaksinasi kepada penyintas COVID-19, bukan merupakan informasi yang dikuasai oleh Badan POM. Disarankan menghubungi PPIID Kementerian Kesehatan RI.		v			v	Dikabulkan Sebagian	Dokumen detail laporan efek samping vaksin setelah digunakan masyarakat (data farmakovigilans) merupakan informasi yang dikecualikan untuk publik berdasarkan a. Pasal 17 huruf b dan huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Lampiran Nomor 1 huruf n Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan c. Lampiran II Nomor IV 1-01.13 Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan d. Lampiran B Nomor 34 Keputusan PPIID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40	2022-03-28	2022-03-28	0	-
15	PST-25022022-038	2022-03-04				Pelaku Usaha	1. Keamanan dan efektivitas vaksin covid 19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia 2. Pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus covid 19. 3. Vaksinasi terhadap penyintas covid 19. 4. Efek samping dari vaksinasi covid 19 dan booster.	1. Permintaan informasi ini dibuat berdasarkan UU KIP (14/2008) dalam kebutuhan terhadap keterbukaan/transparansi data, untuk diketahui dan dipahaminya. 2. Membuat keputusan rasional vaksinasi untuk pribadi atau keluarga. 3. Mengetahui segala macam resiko pasca vaksinasi dan bentuk kepastian tanggung jawab atas segala kemungkinan buruk yang dialami pasca vaksinasi.	v	Informasi terkait pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan vaksinasi terhadap penyintas Covid-19 disarankan menghubungi PPIID Kementerian Kesehatan		v			v	Dikabulkan Sebagian		2022-03-16	2022-03-18	0	-
16	PST-25022022-041	2022-03-04				Karyawan	Semua data dan studi uji klinis dari semua vaksin Covid19 yang beredar dan disetujui di Indonesia, termasuk vaksin untuk booster dan dosis tambahan lain. Bukan hanya fact sheet tetapi semua data lengkap.	UU Keterbukaan informasi publik. Saya selaku warga negara Indonesia berhak mendapat semua informasi lengkap dari vaksin yang disetujui beredar dan digunakan di Indonesia	v			v			v	Dikabulkan Sepenuhnya		2022-03-16	2022-03-17	0	-
17	PST-04032022-101	2022-03-04				Pelaku Usaha	1. Dokumen lengkap dan terperinci Hasil Uji Klinis Vaksin Covid 19 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. 2. Dokumen lengkap dan terperinci Laporan Efek Samping Vaksin Covid 19 setelah penggunaan oleh masyarakat umum, yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI kepada Presiden RI dan/atau DPR RI pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022.	Pengawasan masyarakat. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yang memberi hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.	v			v			v	Dikabulkan Sebagian	Laporan efek samping vaksin COVID-19 setelah digunakan masyarakat (data farmakovigilans) merupakan informasi yang dikecualikan untuk publik berdasarkan a. Pasal 17 huruf b dan huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Lampiran Nomor 1 huruf n Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan c. Lampiran II Nomor IV 1-01.13 Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan d. Lampiran B Nomor 34 Keputusan PPIID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40	2022-03-28	2022-03-28	0	-

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara	
									Dibawah Penggunaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Perbitahtuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
18	PST-16032022-018	2022-03-09				Pelaku Usaha	Profil dan biodata Kepala, Wakil Kepala, seluruh pejabat eselon 1, 2, 3 dan pejabat non ASN setara eselon 1, 2, 3 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sarkasi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Pengawasan masyarakat	v			v			v	Dikabulkan Sebagian	1. Data nama dan jabatan pejabat Eselon 1, 2, 3 atau yang setara sebagaimana terlampir. 2. Profil pejabat Eselon 1. Badan POM dapat diakses melalui website Badan POM (www.pom.go.id) pada menu profil. 3. Data selain yang disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas merupakan informasi yang dicekualikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Informasi Publik b. Lampiran Nomor 6 huruf n Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dicekualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan c. Lampiran II Nomor 1.1.14 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2019	2022-03-24	2022-03-25	0	-
19	PST-16032022-016	2022-03-18				Sarjana Hukum	-Peraturan dan sistem klasifikasi atau kategorisasi tertentu dalam memberikan nomor registrasi produk pangan olahan dan menentukan jenis pangan dan kategori pangan -Apakah jenis atau nama produk ABON CABE dan SAMBAL CABE masuk dalam kategori produk yang sama? -Peraturan terkait istilah/nama produk yang boleh digunakan dalam label di dalam dan/atau kemasan produk	-keperluan pembuktian pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar di bawah Perkara No.84/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	v			v			v	Dikabulkan Sepenuhnya		2022-03-29	2022-03-29	0	-
April 2022																					
1	PST-07042022-001	2022-04-07				Pelaku Usaha	1. Surat Keputusan dan Peraturan yang diterbitkan oleh Badan POM RI tentang Pejabat Wajib Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan pejabat wajib laporan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Badan POM RI. 2. Surat Keputusan/Peraturan tentang unit/satuan kerja pengelola LHKPN/LHKASN di lingkungan Badan POM RI. 3. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Badan POM RI, yang bertanda tangan masing-masing pejabat wajib laporan, untuk tahun pelaporan tahun 2021 dan 2022. 4. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib laporan di lingkungan Badan POM RI untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pejabat wajib laporan, jabatan saat ini, tanggal pelaporan, tanggal tanda terima pelaporan yang diterbitkan oleh KPK RI dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 5. Penjelasan tertulis sarkasi hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat wajib laporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Badan POM RI yang melakukan kewajiban menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN dan/atau tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan,	v			v		v	v	Dikabulkan sebagian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Informasi Publik	2022-04-27	2022-04-28	0	-
2	PST-07042022-033	2022-04-07				Pelaku Usaha	Ybs mengajukan dua permintaan informasi yang Bapak ajukan melalui subalte https://ppid.pom.go.id/ mengenai: 1. Data pabrik perfume, body care, skin care, kosmetika, perfume laundry dengan tujuan informasi untuk menyuplai parfum; dan 2. Data produsen kosmetika dan home care dengan tujuan informasi untuk supply bahan pengharum.	Untuk menawarkan produk botol kemasan ke perusahaan							v	Ditolak	1. Lampiran II Nomor III RG.02.02.02 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Anasp Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Lampiran huruf G Nomor 7 Keputusan PPHD Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dicekualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022-04-11	2022-04-13	0	-

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Belum Didokumentasikan	Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara		
									Dibawah Pengawasan	Tidak		Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran	
									Ya	Tidak												
3	PST-07042022-054	2022-04-07				Pelaku Usaha	1. Rekapitulasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pengadaan, satuan kerja, pagu anggaran, metode pengadaan. 2. Rekapitulasi realisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pengadaan, satuan kerja, pagu anggaran, metode pengadaan, nilai pengadaan, nama dan alamat penyedia barang jasa pelaksanaan pengadaan.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan	v				v			v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-04-20	2022-04-20	0	-
4	PST-11042022-074	2022-04-11				Sarjana Hukum	1. Apakah Badan POM menggunakan sistem klasifikasi atau kategorisasi tertentu dalam memberikan nomor registrasi produk pangan olahan dan menentukan jenis pangan dan kategori pangan? Jika ya, mohon diinformasikan peraturan yang mengaturnya. 2. Apakah jenis atau nama produk Cabe Tabur, Sambal Tabur, Nori Tabur termasuk ke dalam kategori produk pangan olahan? Jika ya, apakah kode yang dapat menunjukkan kelompok kategori produk tersebut? 3. Apakah dalam menentukan nama jenis (termasuk istilah/nama produk yang boleh digunakan dalam label di dalam dan/atau kemasan produk), Badan POM mengaturnya dalam peraturan tertentu? Jika ya, mohon diinformasikan peraturan yang mengaturnya. 4. Apakah nama produk Cabe Tabur, Sambal Tabur, Nori Tabur telah tercatat dalam daftar PI-RT dan MD - BPOM sejak sebelum tahun 2017?	1. Permohonan ini kami ajukan terkait dengan keperluan pembuktian pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan Gugatan Pembatalan Merek dan Ganti Rugi terhadap Pelanggaran Hak atas Merek yang telah terdaftar di bawah Perkara No. 13/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst; 2. Kami memahami bahwa website Badan POM tidak bisa menampilkan informasi terkait produk-produk yang izin edarnya sudah habis masa berlakunya. 3. Dalam hal ini, kami bismat untuk memperoleh keterangan tertulis dari Badan POM dan atas dasar tersebut kami mengirimkan permohonan email ini kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	v				v		v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-04-25	2022-04-26	0	-	
5	PST-12042022-052	2022-04-12				Pelaku Usaha	1. Rekapitulasi pemberian/penjatihan sanksi hukuman kepada pejabat/pegawai di lingkungan Badan POM RI pada tahun 2010 sampai dengan 2022, yang memuat keterangan nama, jabatan, bentuk pelanggaran, instansi pemeriksa, bentuk sanksi, pejabat pemberi sanksi. 2. Rekapitulasi pemberian sanksi oleh Badan POM RI kepada pelaku usaha yang melanggar aturan pada tahun 2010 sampai dengan 2022, yang memuat keterangan nama, alamat, bidang usaha, bentuk pelanggaran, instansi pemeriksa, bentuk sanksi, pejabat pemberi sanksi. 3. Seluruh surat keputusan dan/atau surat lainnya yang mengesahkan pemberian/penjatihan sanksi sebagaimana poin 1 dan 2 di atas.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan						v	Ditolak	1. Pasal 17 huruf h dan huruf j UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Lampiran Nomor 6 huruf j dan huruf m serta Lampiran Nomor 2 huruf ff dan hh Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022-04-22	2022-04-25	0	-		
6	PST-13042022-012	2022-04-13				Pelaku Usaha	1. Rekapitulasi izin edar semua komoditi yang dikeluarkan oleh Badan POM RI pada tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama produk, nama produsen, alamat produsen, tanggal keluar izin, masa berlaku izin. 2. Seluruh surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI tentang izin edar sebagaimana poin 1 di atas. 3. Rekapitulasi permohonan izin edar yang disampaikan oleh produsen produk kepada Badan POM RI pada tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama produk, nama produsen, alamat produsen, tanggal permohonan. 4. Seluruh surat permohonan sebagaimana poin 3 di atas.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan.						v	Dikabulkan sebagian	1.17 huruf b dan huruf j UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Lampiran Nomor 2 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf g Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022-04-28	2022-04-28	0	-		
7	PST-19042022-005	2022-04-19				Apoteker	Data obat palsu di Indonesia dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Beserta data mengenai harga dan asal negaranya.	Penelitian, bahan riset untuk studi S3	v					v	Dikabulkan sebagian	1. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Lampiran Nomor 2 huruf ff dan ii Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022-05-20	2022-05-25	0	-		
8	PST-21042022-021	2022-04-21				Pelaku Usaha	1. Rekapitulasi rencana pengalokasian anggaran pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk program/kegiatan di lingkungan Badan POM RI yang terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah/pagu anggaran, satuan kerja yang melaksanakan/mengelola, dan tanggal dilaksanakannya kegiatan/anggaran. 2. Rekapitulasi realisasi kegiatan/anggaran untuk program/kegiatan di lingkungan Badan POM RI yang terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah anggaran, bentuk kegiatan, satuan kerja yang mengelola, dan tanggal dimulainya/dilaksanakannya kegiatan, dan tanggal pencatatan anggaran.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan.	v					v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-05-24	2022-05-24	0	-		

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Belum Didokumentasikan	Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara		
									Dibawah Pengawasan	Ya		Tidak	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
9	PST-26042022-001	2022-04-26				Pelaku Usaha	1. Penjelasan tertulis, berapa standar gaji dan tunjangan serta honor yang diterima oleh/diberikan kepada masing-masing Kepala, Wakil Kepala, dan seluruh pejabat struktural eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Badan POM RI saat ini? 2. Penjelasan tertulis, fasilitas apa saja yang diterima oleh/diberikan kepada masing-masing Kepala, Wakil Kepala, dan seluruh pejabat struktural eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Badan POM RI saat ini? 3. Salinan dokumen bukti penempatan/pencairan dana dari seluruh transaksi pembayaran gaji, tunjangan dan honor untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2022 yang diterima oleh masing-masing Kepala, Wakil Kepala, dan seluruh pejabat struktural eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Badan POM RI saat ini. 4. Salinan dokumen bukti serah terima pemakaian fasilitas dinas oleh masing-masing Kepala, Wakil Kepala, dan seluruh pejabat struktural eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Badan POM RI saat ini. 5. Salinan Peraturan/Keputusan yang menjadi dasar hukum pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan penerimaan fasilitas dinas dari seluruh pejabat/aparatur negara di lingkungan Badan POM RI saat ini.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan sarana masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.	v						v	v	Dikabulkan sebagian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Lampiran 1 Nomor I KP 05.03, KP 05.07, dan KP 10 serta Lampiran 1 Nomor V KU 01.12, KU 01.02, KU 01.03 dan KU 01.04, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Asip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022-05-30	2022-05-30	0	-
Mei 2022																						
1	PST-19052022-077	2022-05-19				Pelaku Usaha	Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di lingkungan Badan POM RI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf K dan huruf L Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan sarana masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.	v				v				Ditolak	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2022-06-13	2022-06-14	0	-
Juni 2022																						
1	PST-03062022-001	2022-06-03				LSM	1. Penjelasan tertulis, apakah PPIID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPIID badan publik? Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berikim surat? Menyediakan formulir isian elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? Menyediakan sarana pelayanan informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dan kalangan disabilitas? 2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing-masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? Apa link/tautan dari konten informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik? 3. Penjelasan tertulis, apakah PPIID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya? 4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dan masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022?	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan sarana masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.	v			v			v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-06-06	2022-06-07	0	-
2	PST-17062022-005	2022-06-17				Umum	Jumlah konsumsi berikut ini untuk tahun 2021 dan 2022, dalam satuan gram per kapita/bulan: a. susu UHT b. susu kental manis c. susu pasteurisasi d. yoghurt e. susu bubuk	Sebagai bahan untuk penyuluhan ke peternak sapi perah sehingga peternak termotivasi untuk melakukan pengolahan susu							v				2022-06-21	2022-06-22	0	-
3	PST-23062022-002	2022-06-23				Karyawan	Data Penjualan Produk Suplemen Kesehatan Nasional Indonesia 2018 - 2021. Data Penjualan Produk Susu Bubuk Nasional Indonesia 2018 - 2021. 10 Produk Suplemen Kesehatan yang paling banyak terjual 2021.	Sebagai bahan terhadap Kajian dengan judul Suplemen Kesehatan dan Susu Bubuk di Indonesia. Kajian ini membahas perubahan dan pertumbuhan industri suplemen kesehatan dan susu bubuk sebelum pandemic COVID-19 dan setelah pandemic.						v					2022-06-28	2022-06-28	0	-
Juli 2022																						
1	PST-08072022-021	2022-07-08				Umum	Data terkait daftar provinsi dan kab/kota yg sudah dan belum membentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah	Untuk data dukung Surat Edaran Mendagri tentang Peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah	v			v			v		Dikabulkan Sepenuhnya		2022-07-13	2022-07-15	0	-
2	PST-15072022-018	2022-07-15				Karyawan	1. Berapa sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan yang tersebar di 34 propinsi dengan rincian tiap provinsi? 2. Apakah pada tahun 2021 seluruh sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan telah dilakukan pengawasan/pemeriksaan? 3. Berapa jumlah pegawai Badan POM pada Tahun 2021?	Penyusunan Tesis	v						v		Dikabulkan sepenuhnya		2022-07-20	2022-07-20	0	-
Agustus 2022																						
1	PST-04082022-022	2022-08-04				Karyawan	Informasi manfaat dan resiko penggunaan booster 3 dan 4	Untuk mengetahui secara pribadi apakah manfaat keluarga saya tiap tahun 2x disuntik booster	v			v			v		Dikabulkan Sebagian		2022-08-18	2022-08-18	0	-

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Belum Didokumentasikan	Bentuk		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara	
									Dibawah Pengawasan			Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
2	PST-15082022-032	2022-08-12				Pelajar/Mahasiswa	Data public warning yang bertandatangan oleh Kepala BPOM mengenai Kopi Cleng yang pada Tanggal 5 Maret 2022 dilakukan Pers BPOM dan Data Public warning yang dilengkapi Tanda Tangan Kepala BPOM guna keabsahan hukum kevalidan data dengan Nomor: HM. 04.01.1.53.11.11.09775 yang dikeluarkan Pada Tanggal 25 November 2011 tentang Masyarakat Perlu Mewaspadai Beredarnya Kopi yang dicampur Bahan Kimia Obat.	Untuk bahan penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengonsumsi Kopi Cleng Yang Mengandung BKO Paracetamol dan Sildenafil Citrate".						v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-08-23	2022-08-24	0	-	
3	PST-15082022-019	2022-08-15				Pelajar/Mahasiswa	Data vaksin COVID-19 yang diterima Indonesia melalui Covax Facility periode tahun 2020-2021	Memenuhi data untuk tugas akhir skripsi	v			v			v	Dikabulkan Sebagian		2022-09-05	2022-09-05	0	-
4	PST-30082022-009	2022-08-30				Pelaku Usaha	List perusahaan/distributor yang telah mendapatkan Sertifikasi SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan)	Sebagai referensi & mengetahui perusahaan/distributor mana saja yang telah memiliki sertifikasi SMKPO dikarenakan tidak menemukan data aktual di internet	v			v			v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-08-30	2022-08-31	0	-
September 2022																					
1	PST-05092022-098	2022-09-05				Umum	Berdasarkan keterangan dari situs https://kumparan.com/kumparannews/bpom-cabut-lzin-obat-penerang-seperti-yang-dipakai-lucita-luna-sejak-2016-tssmrtbylBM dan pernyataan "Kasubdit Penyidik Napza BPOM, Bhakti Eri, mengatakan obat dengan kandungan Hexamer 2 dan Trihexyphenidyl yang dijual tersangka ZK sudah lama ditarik dari pasaran. Kedua bahan itu sejenis dengan".	Untuk keperluan saksi ahli mengenai penyalahgunaan Trihexyphenidyl	v						v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-09-22	2022-09-23	0	-
2	PST-22092022-018	2022-09-22				Pelaku Usaha	Halo PPIID POM, Perkenalkan saya Bella Nofita dari IQVIA Indonesia, Bisakah saya meminta informasinya untuk status masa paten obat dari obat-obat berikut: Dextalin 30 mg Salazopyrin 500 mg Exforge 5160	(pemohon belum menyebutkan tujuan dan melengkapi persyaratan)								Tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap		-	-	-	-
3	PST-22092022-041	2022-09-22				Dokter	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewajiban Lembaga Internasional Non Profit di Bidang Kesehatan, yang akan berikan obat-obatan gratis, bekerja sama dengan Pemerintah, Industri Farmasi, PBF, dan /atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Mengadakan kerjasama antara Lembaga Internasional Non Profit di Bidang Kesehatan dengan Pemerintah, Industri Farmasi, PBF dan / atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2022-09-28	2022-09-29	0	-
4	PST-22092022-042	2022-09-22				Karyawan	Data statistik jumlah pangan dihari berkiam terdaftar yang terupdate	Keperluan market research mengenai functional food di Indonesia	v						v	Tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap		-	-	-	-

* Identitas Pemohon dirahasiakan, disimpan di Arsip PPIID

** Dari 48 permintaan informasi, 2 diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap